Gerakan Mahasiswa:
Sudah Saatnya 'Menikahi' Rakyat!

Zainal A.M. Husein[1]

Sudah sangat lama kita menjadi 'penonton' dalam gerak alur sejarah yang menyajikan pergerakan mahasiswa dengan darah tertumpah, erangan kesakitan, dan telesan air mata. Dan selama itu pula, kita menjadi 'penonton' bagi peutas perlawanan mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap musuhnya. Dalam analisa posisi *vis a vis*, setidaknya pergerakan mahasiswa mempunyai tiga 'musuh' utama, yakni; **Pertama**, kebobrokan kampus dan birokrasi kampus, serta segala permasalahan tentang pola kehidupan kampus. Dalam wilayah ini yang terjadi adalah bentuk perlawanan mahasiswa sebagai reaksi pada kebijakan-kebijakan kampus maupun tata cara sistem pendidikan yang dibangunnya.[2] Musuh ini makin 'nyata' karena campur tangan rezim untuk melakukan depolitisasi mahasiswa dalam kerangka 'penjinakan' mahasiswa[3]

Kedua, kebobrokan negara, aparat eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam seluruh lapisan. Di sini mahasiswa menjadi penyeru lantang terhadap setiap bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, selain itu juga berbentuk teriakan lantang pada kebijakan-kebijakan yang melanggar hak azasi manusia;[4]

Ketiga, kondisi kehidupan secara global, baik berbentuk penjajahan fisik maupun pemikiran yang mengancam kehidupan rakyat atau manusia secara keseluruhan. Pada kondisi ini sangat memungkinkan rezim modal untuk berkuasa. Kepentingan pemodal-lah yang menentukan mana yang 'baik' bagi rakyat, termasuk mana yang 'baik' bagi mahasiswa dalam bingkai kecil dan pendidikan dalam bingkai yang lebih besar. Cuma pendidikan? Tidak! Sampai gaya hidup bahkan termasuk cara beragama!

Perlawanan terhadap musuh terebut melahirkan begitu beragam pergerakan mahasiswa dan tipe-tipenya yang tentunya selalu disesuaikan dengan strandarisasi kebutuhan akan pergerakan. Tetapi hal yang menarik adalah karena sesungguhnya ketiga musuh ini tidak pernah berjalan sendiri, tapi selalu berjalan beriringan,

---

[1] Mantan Mahasiswa UGM yang sangat bersyukur karena meskipun mengalami era menguatnya depolitisasi terhadap mahasiswa tetapi paling tidak, sampai saat lulus belum terbebani biaya mahal pendidikan kampus ini.

[2] Hal ini tentunya mengingatkan kita pada pergerakan mahasiswa Amerika Latin yang mulai menyatakan Manifesto Cordoba yang berisi, "Kami ingin menghapus organisasi universitas dari segala konsep tentang otoritas yang kuno dan barbar, yang menjadikan universitas menjadi benteng pertahanan para tiran yang absurd". Kemudian manifesto ini menjadi semangat bersama untuk melakukan perlawanan pada para pihak kampus dengan tuntutan pelibatan mahasiswa pada pengelolaan administrasi universitas, pembaharuan kurikulum, dan pemberian kebebasan yang lebih pada mahasiswa. Lihat: *Mahasiswa Bergerak*, YLBHI, Jakarta, 1999.

[3] Tentunya kita juga belum amnesia pada sejarah gerakan mahasiswa yang di penghujung tahun 70-an. Maraknya demo dan pergerakan mahasiswa yang menentang kebijakan ekonomi, telah membuat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan NKK/BKK (SK. No.0156/U/1978 dan SK. 057/U/1979), termasuk kebijakan ancaman DO yang ketat bagi setiap aktifis yang berani keluar kampus dan lantang menerlakkan masalah politik. Belum cukup itu, SK. No.0124 mengeluarkan paket SKS (sistem kredit semester) sehingga mahasiswa dipaksa untuk sibuk kuliah. Paket inilah yang menjadi tonggak pertama pergeseran mahasiswa menjadi pragmatis bahkan apolitis. Lihat: *Membaca Sejarah Pergerakan*, Riset Utama pada majalah Tradem, PMII Cab. Bulaksumur, Edisi V, 2003.

[4] Tragedi kemanusiaan akibatpelanggaran HAM ini tentunya masih kita ingat. Mulai dari tanjung priok, Tim-tim bahkan Aceh saat ini.

bahkan bahu membahu dan berbagi peran dalam posisi yang berhadapan dengan mahasiswa. Dan jika dirunut lebih jauh, maka kepentingan tertentu yang kemudian menciptakan ideologinya tersendiri atau menggunakan ideologi yang sesuai dengan kepentingannya adalah hal yang selalu terjadi. Akhirnya perlawanan mahasiswa tidak *dapat menemukan musuh yang konkrit, malahan menyeret gerakan mahasiswa* untuk bersibuk-sibuk dalam mencari musuh yang konkrit, demi kongkretisasi pergerakan.

Padahal era transisi adalah era dimana sesuatu yang lazim digunakan pada masa yang biasa, sudah sama sekali tidak berfungsi. Karenanya kita butuhkan bukan sekedar keadilan transisi, tetapi juga pergerakan mahasiswa transisi.

Identitas Gerakan Mahasiswa

Perumusan gerakan mahasiswa Indonesia hampir selalu mengalami kisah *krisis ketika sudah merumuskan identitas sesungguhnya yang dikaitkan dengan* persinggungannya dengan masyarakat. Seringkali mahasiswa merasa adalah diri yang sangat istimewa. Secara identitas bahkan mahasiswa menganggap bahwa mereka adalah 'Sang Messiah' yang senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan perubahan. Artinya, mereka menginginkan seluruh masyarakat untuk ikut dan berada di barisan mereka. Berdiri dan berfikir dengan cara mereka. Pembawaan dan cara berfikir seperti ini membawa beberapa implikasi. **Pertama**, tidak adanya saling pengertian yang baik antara masyarakat dan mahasiswa.[5] Akibatnya adalah kegamangan mahasiswa dalam menentukan basis massa realnya.[6] *Termasuk ketika berhitung tentang segmen masyarakat mana saja yang akan diajak* untuk beraliansi, baik secara taktis ataupun strategis.

Kedua, jauhnya realitas pembawaan isyu pergerakan mahasiswa yang menganggap dirinya adalah representasi dari rakyat, dengan perasaan rakyat bahwa terwakili oleh mahasiswa. Pada saat mereka merasa mewakili rakyat, sedang pada saat yang sama mereka berfikir dan bertindak tidak dengan cara rakyat. Tindakan dulistik ini tentu saja tidak membawa keuntungan yang berarti pada gerakan mahasiswa.

Ketiga, keterbatasan pelibatan tersebut juga berakibat yang cukup signifikan *pada orientasi gerakan mahasiswa yang makin menunjukkan ketidakjelasan.* Oleh karenanya, terkadang gerakan mahasiswa tidak tetap pada agenda rakyat, malah lari ke wilayah politis (yang banyak dikendalikan oleh kekuatan antidemokrasi). Efek selanjutnya dari hal ini adalah gerakan-gerakan mahasiwa makin terpolar, dan juga terfragmentasi dalam berbagai hal, kepentingan, lembaga bahkan pilihan aliansi yang ingin dilakukannya.

Gerakan Mahasiswa Di Era Transisi

---

[5] Sejarah pergerakan mahasiswa yang terkini di Indonesia, hamper-hampir tidak menunjukkan lagi kemanunggalan mahasiswa dan rakyat. Paling terakhir hanyalah pada proses penjatuhan Soeharto di pertengahan *Mei 1998. Ilupun harusnya dimaknai bukan karena solidilas gerakan mahasiswa, tetapi faclor-faklor lain selain* gerakan mahasiswa juga mengambil porsi yang sangat penting.

[6] Pola pergerakan yang 'menikahi' basis massa terlihat dari contoh gerakan mahasiswa di kota Oruro, Bolivia pada Oktober 1964. Mereka berhasil melakukan alaiansi revolusioner dengan massa buruh pekerja tambang. Sehingga setiap buruh tambang mogok, mahasiswa akan ikut keluar dari kampus dan kemudian mendukungnya *dengan uang, pakaian serta makanan. Sedangkan ketika demonstrasi yang digalang oleh mahasiswa, buruh akan* mendukung mereka untuk memberikan bantuan material.

Secara ontologis, pergerakan mahasiswa berada pada wilayah gerakan moral dan bukan gerakan politik kekuasaan. Berangkat dari pola ini, maka sudah saatnya ada beberapa agenda awal yang harus secara sadar dilakukan oleh mahasiswa sebagai elemen dasar dari pergerakan mereka. **Pertama**, secara sadar tetap berjalan *pada agenda advokatif*[7] *yang menjadi elemen mendasar dari pergerakan mahasiswa.* Agenda yang penad dengan kebutuhan rakyat inilah yang lebih harus digalakkan. Mengingat bahwa mahasiswa tidak dapat mengurusi segala hal secara bersamaan, sehingga harus beralih pada agenda-agenda rakyat.

Kedua, melakukan upaya-upaya pengasahan keintelektualan yang juga menjadi basis dari setiap gerakan. Pengasahan kemampuan diri ini juga tidak kalah pentingnya dari hal yang lain. **Ketiga**, Siap dengan program kaderisasi untuk menyiapkan sumber daya yang cukup untuk terus mengawal isyu besar dan melawan musuh-musuh besar tersebut.

Refleksi

Bukan karena perjuangan maka kita jadi mahasiswa, tetapi karena kita mahasiswa maka kita harus berjuang!

Hanya melalui tahap dan pola kesiapan tersebut mahasiswa dapat menikah dengan rakyat untuk melakukan perubahan secara bersama. Mahasiswa dapat berdiri bersama dengan rakyat untuk menriakkan satu hal yang sama yakni perubahan.

Siapa sih sesungguhnya mahasiswa? Atau siapa sih rakyat? Pertanyaan hakikat macam ini tentu akan melahirkan jawaban yang beragam. Jawaban yang sangat tergantung pada tingkat pengalaman bersentuhan dengan mahasiswa, atau pernah menjadi mahasiswa, atau pada tahun berapa jadi mahasiswa, atau kepentingan politik apa ataupun bahkan tergantung manusianya. Keduanya memang *sulit dibedakan sebagai manusia, tetapi sebagai syarat pergerakan, -mengutip kata* Jalaluddin Rumi tentang laki-laki dan perempuan-, mereka harus menikah!

Pola inisiasi kampus (atau apapun namanya) punya kewajiban untuk ikut menjadi kawah 'candradimuka' untuk semua hal itu. Jika Inisiasi kampus hanya sekedar menimbulkan kecintaan pada kampus dan bukan pada rakyat, maka kampus dan program inisiasinya tidak perlu ada untuk hal itu. [ ]

---

[7] Kalau berpegang pada defenisi Advokasi, tentu saja wilayah gerakan mahasiswa hanya pada beberapa isyu spesifik dan tertentu. Tetapi yang dimaksudkan pada tulisan ini adalah pengertian advokasi yang sudah sangat diperluas, sehingga beberapa istilah pola advokasi dapat digunakan.